

MEMILIH PEMIMPIN BERHIKMAT

oleh FX Ridwan Handoyo

Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Gedung Kusuma Karmel lantai 4 pk. 18.00 – 22.00, Seksi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) Paroki MKK mengadakan bincang-bincang politik bertema “**Memilih Pemimpin Berhikmat**” sebagai suatu kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif pada tanggal 17 April 2019. Dalam kegiatan ini, Seksi HAAK mengundang 2 narasumber; yaitu Bpk. J. Kristiadi; peneliti senior di *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) dan Bpk. Trias Kunchayono; pensiunan wartawan senior dari harian Kompas. Kegiatan ini dimoderatori oleh Bpk. Agustinus Didiek Dwinarmiyadi. Tulisan ini berusaha merangkum beberapa hal penting dari kegiatan di atas.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Paroki MKK: Romo Arnoldus Devanto, O.Carm menyampaikan bahwa kegiatan ini selain terkait dengan Pilpres dan Pileg 2019, terkait pula dengan tema pastoral Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2019 ini; yaitu: **Amalkan Pancasila: Kita Berhikmat, Bangsa Bermartabat**. Berhikmat mengandung arti menggunakan pengetahuan yang kita miliki dengan benar. Sebagai murid Kristus, kebenaran ada dalam sabda Tuhan dan semangat Roh Kudus. Pemimpin yang berhikmat adalah pemimpin yang mendasarkan dan menggunakan kekuasaannya dalam roh kebenaran yang sejalan dengan sabda Tuhan dan dorongan Roh Kudus tersebut. Agar negara kita mendapatkan pemimpin yang berhikmat dan sejalan dengan iman Kristiani, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh umat Katolik.

Bpk. J. Kristiadi; sebagai pembicara pertama, mengangkat tema: *Vox Populi Vox Dei* (Suara Rakyat adalah Suara Tuhan): Harus Sadar dan Peduli Politik. Beliau menyampaikan pentingnya umat Katolik untuk memilih pemimpin yang dapat menjamin keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD 45 dan Pancasila-nya. Penting pula untuk memilih pemimpin yang tidak menggunakan ikatan-ikatan primordial; seperti: agama, suku, ras, dan asal-usul keturunannya dalam berkampanye.

Secara sederhana, beliau menyampaikan bahwa politik adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan dan/atau membagi kekuasaan. Politik adalah sesuatu yang suci sifatnya. Allah Bapa juga dapat dikatakan “berpolitik” melalui inkarnasi putranya, Yesus Kristus, ke dunia untuk menebus dosa manusia agar manusia dapat kembali menjadi “anak-anak Terang”.

Dalam berpolitik, partisipasi rakyat/publik dalam memberikan “suara” adalah suatu wujud tindakan paling utama/penting karena suara rakyat tersebut berfungsi untuk mengkomunikasikan kepentingan, preferensi serta aspirasi rakyat kepada pemegang kekuasaan agar dapat mempengaruhi pemegang kekuasaan dalam membuat kebijakan publik yang akan sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat (sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun). Umat Katolik wajib terlibat aktif dalam kegiatan politik karena hal ini adalah bagian dari tugas perutusannya; paling tidak dari sudut pandang menyelamatkan tata kelola negara dari pihak-pihak yang sekedar mengumbar “nafsu berkuasa” yang tidak sejalan dengan iman Kristiani.

Politik adalah suatu medan adu siasat dalam mendapatkan kekuasaan sehingga tidak mudah membedakan “hitam-putih”-nya dan lebih sering kita dihadapkan pada pilihan antara yang “buruk” dan yang “kurang buruk”. Untuk itu, kita tidak boleh “golput” dan harus menjadi pemilih yang cerdas dengan cara secara aktif mencari tahu dan mencermati rekam jejak serta prestasi dari calon-calon yang ada dan tidak terpaku hanya pada ketertarikan fisik, janji, ilusi ataupun menjadi takut karena kampanye-kampanye yang mengeksploitasi rasa benci melalui pendekatan ikatan primordial.

Umat Katolik juga harus selalu berhati-hati (waspada) terhadap hoax yang banyak bertebaran saat ini.

Hoax dapat disebarkan secara sistematis untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara menguras dan/atau memanipulasi emosi masyarakat serta memanipulasi kata-kata (fakta).

Bpk. Trias Kuncahyono, sebagai pembicara ke dua, mengangkat tema: Hati-Hati Memilih! Gunakan Selalu Akal Sehat dan Bersandarlah pada Hati Nurani untuk Memilih Orang Baik. Kita perlu berhati-hati karena “warisan” dari Pemilu 2014 antara lain adalah: 1) terjadinya perpecahan dan permusuhan di masyarakat, 2) menguatnya peran agama dalam kampanye, 3) semakin tidak rasionalnya dalam berpolitik dan 4) menguatnya peran media sosial (khususnya dalam penyebaran hoax). Umat Katolik perlu berpartisipasi aktif agar warisan Pemilu 2014 tersebut tidak berlanjut dan menjadi bertambah parah.

Terkait dengan hoax, Bpk. Trias secara panjang lebar menyampaikan bahwa:

1. Bagi politisi dan konsultan politik, hoax sudah dianggap sebagai “*part of the game*” yang tidak dapat dipisahkan dalam pertarungan politik dewasa ini
2. Hoax menjadi pesan politik untuk mendukung strategi yang disebut “*firehose of falsehood*”
3. Hoax sengaja disebar untuk menciptakan suasana ketakutan dan penuh “ancaman” yang memunculkan persepsi bahwa negara butuh pemimpin yang kuat, tegas, berani menghadapi ancaman yang muncul. Bukan pemimpin yang sederhana, rendah hati, penuh simpati

Strategi “*firehose of falsehood*” dilakukan dengan cara:

1. Membuat/menyebarkan berita yang bersifat kontroversial dan provokasi
2. Penyebaran dilakukan dengan cepat, terus-menerus dan diulang-ulang
3. Tidak peduli dengan data dan fakta
4. Isi berita tidak perlu konsisten
5. Menggunakan pendekatan “*politics of identity*” (mengeksplorasi faktor-faktor primordial seperti agama, suku, ras dan sejenisnya)
6. Strategi ini digunakan berdasarkan konsep propaganda di jaman Hitler: *Sampaikan kebohongan yang besar, teruslah mengulanginya, maka masyarakat pada akhirnya akan mempercayainya*
7. Tujuannya mengaktifkan “*reptilian brain*” dengan “*fear*”

Akibat dari penggunaan strategi ini, perpecahan dan permusuhan di masyarakat akan semakin kuat. Ini sejenis dengan politik adu-domba. Tidak akan mudah memang untuk mengubah pandangan mereka yang sudah “termakan” oleh strategi ini. Sebagai bagian dari tugas perutusan umat Katolik, kita dapat tetap berusaha menebarkan kebijaksanaan mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita dan dengan cara yang tetap penuh kasih agar tidak memunculkan perpecahan dan permusuhan (ingat juga: “*Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?*” — Matius 5:13).

Dalam menentukan pilihan untuk pemimpin kita, pelajari dengan baik siapa saja partai-partai dan ormas-ormas pendukungnya. Cari tahu juga ideologi dan kegiatan-kegiatan dari partai-partai dan ormas-ormas tersebut. Pastikan bahwa para pendukung tersebut konsisten dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD 45 dan Pancasila-nya. Bila Anda telah menetapkan pilihan untuk calon presiden/wakil presiden, perlu dipertimbangkan untuk memilih anggota DPR RI dan DRDP Provinsi dari partai pendukung calon presiden/wakil presiden tersebut.

Kitab Suci telah mengajarkan kita bagaimana memilih pemimpin yang baik. Dalam 1 Samuel 16:7 disebutkan: “***Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati***”. Jangan lupa, perilaku masa lalu dari seorang pemimpin akan terbawa pada perilaku masa depannya!

Beberapa hal teknis terkait dengan Pilpres dan Pileg 2019 yang dapat penulis tambahkan di sini:

Sebagai warga DKI Jakarta, umat paroki MKK akan mendapatkan 4 (empat) kartu suara; yaitu:



Kertas suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi akan berisi kotak-kotak dengan nomor urut, tanda gambar dan nama partai serta di bawahnya daftar nama-nama caleg dari masing-masing partai. Contoh:



Untuk menentukan pilihan Anda bagi anggota DPR RI dan DPRD Provinsi, Anda dapat memberikan coblosan dengan alat coblos yang disediakan pada nomor partai, atau tanda gambar/nama partai dan/atau pada kotak nama calon.

- Untuk calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, datanya dapat dilihat di: <https://kpujakarta.go.id/partai-peserta-pemilu/> (MKK termasuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 10)
- Untuk calon anggota DPR RI, datanya dapat diunduh di: https://drive.google.com/open?id=1ZPPneSfyEgUF0LQy_LsWDrsvJkd05nqr (MKK termasuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3)

Surat suara untuk anggota DPD akan berisi nomor urut (di mulai dari nomor 21), foto calon dan nama calon. Contoh:



Untuk menentukan pilihan Anda bagi anggota DPD, coblos satu kali dengan alat coblos yang disediakan pada nomor urut, foto atau nama dari calon yang Anda pilih.

- Untuk calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, datanya dapat diunduh di: <https://drive.google.com/open?id=1coTwwPf-PiihiI9wv4pkX0aZ-XJtUE6b>

Catatan: Daftar Calon Tetap untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPD Provinsi di atas berdasarkan Surat Keputusan KPU bulan September 2018. Masih dimungkinkan terjadinya perubahan atas daftar tersebut.

Surat suara untuk pemilihan presiden/wakil presiden akan berisi nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon dan daftar partai pengusulnya. Contoh:



Untuk menentukan pilihan Anda bagi presiden dan wakil presiden, coblos satu kali dengan alat coblos yang disediakan pada nomor urut, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul.

Beberapa alamat website terkait Pemilu 2019:

1. <https://www.kpu.go.id/>
2. <https://kpujakarta.go.id/>
3. <https://kpu-jakartabaratkota.go.id/>
4. <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>
5. <https://perludem.org/>
6. <https://jariungu.com/>

Jakarta, 17 Februari 2019